UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu. Namun, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemrintah Kabupaten Rokan Hulu bersengketa memperebutkan lima desa. Perebutan lima desa antara Pemrintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui proses yang sangat panjang dan melelahklan.

Sehingga pada akhirnya keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 yang menyatakan lima desa masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Namun, realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 yang menyatakan lima desa masuk ke wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak sepenunya terlaksana. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu Bagaimana realisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/tentang penegasan status wilayah lima desa di kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sosiologis. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data-data mengenai realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395/K/TUN/2011 tentang penegasan status wilayah lima desa di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tentang menetapkan lima desa masuk ke wilayah Kabupaten Kampar tidak sepenuhnya terlaksana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mengklaim bahwa lima desa tersebut masuk ke Kabupaten Rokan Hulu, faktor penghambatnya adalah masih berdiri dan berfungsinya Kantor pelayanan administrasi pemerintahan desa milik pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Tapung Hulu, masih adanya 85 % masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hulu dan masyarakat lima desa lebih memilih Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan Kecamatan Tapung Hulu